

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Letjen Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 3 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara

Telp. (0286) 592810

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banjarnegara, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Ali Imron, S.H.
NIP. 196804051993031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Banjarnegara, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Ali Imron, S.H.

NIP. 196804051993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN LAPORAN.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
NERACA.....	2
LAPORAN OPERASIONAL.....	4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	6
A. PENJELASAN UMUM.....	6
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis.....	6
A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	5
A.3 BASIS AKUNTANSI.....	5
A.4 DASAR PENGUKURAN.....	5
A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
B.1 Pendapatan.....	5
B.2 Belanja.....	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	26
C.1 Kas di Bendahara Pengeluarn.....	26
C.2 Piutang Bukan Pajak.....	26
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	27
C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	27
C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	27
C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	28
C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	28
C.8 Persediaan.....	29
C.9 Persediaan Belum Diregister.....	30
C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	30
C.11 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran.....	30
C.12 Piutang Jangka Panjang lainnya.....	31
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang.....	31
C.14 Properti Investasi.....	32
C.15 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	32
C.16 Tanah.....	32
C.17 Tanah Belum Diregister.....	33
C.18 Peralatan dan Mesin.....	33
C.19 Peralatan dan Mesin Belum Diregister.....	33
C.20 Gedung dan Bangunan.....	33

C.21	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	34
C.22	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
C.23	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	35
C.24	Aset Tetap Lainnya	35
C.25	Aset Tetap yang Belum Diregister	35
C.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35
C.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
C.28	Aset Konsesi Jasa	36
C.29	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	37
C.30	Aset Tak Berwujud	37
C.31	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	38
C.32	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	38
C.33	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	39
C.34	Aset Lain-lain	39
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	40
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	40
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	40
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	41
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	41
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	41
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	46
C.42	Uang Muka dari KPPN	46
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	46
C.44	Kewajiban Konsesi Jasa	47
C.45	Ekuitas	47
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL	48
D.1	Pendapatan Perpajakan	48
D.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
D.3	Beban Pegawai	49
D.4	Beban Persediaan	49
D.5	Beban Barang dan Jasa	50
D.6	Beban Pemeliharaan	50
D.7	Beban Perjalanan Dinas	51
D.8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	51
D.9	Beban Bantuan Sosial	52
D.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	53
D.12	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	53
D.13	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	53
D.14	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	54
D.15	Pos Luar Biasa	54
D.16	Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19	55
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	56

E.1	Ekuitas Awal.....	56
E.2	Surplus (Defisit) LO	56
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	56
E.4	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	60
LAMPIRAN DAN DAFTAR.....		63

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp124.880.000 atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp124.880.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.992.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.992.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.992.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp259.559.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp130.531.730 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp129.027.770, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp129.027.770.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp4.403.730, ditambah Surplus-LO sebesar Rp129.027.770 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar

Entitas sebesar -128.439.500 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp4.992.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	40.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	40.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	124.880.000	124.880.000	100,00	124.745.000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		124.880.000	124.880.000	100,00	124.745.000

Banjarnegara, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ali Imron, S.H.
196804051993031002

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catata	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjual	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti R	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntuta	C.14	-	-
Persediaan	C.15	4.992.000	4.403.730
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		4.992.000	4.403.730
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		4.992.000	4.403.730
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-

Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	4.992.000	4.403.730
JUMLAH EKUTAS		4.992.000	4.403.730
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.992.000	4.403.730

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	259.559.500	282.378.000
Jumlah Pendapatan		259.559.500	282.378.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	14.151.730	11.414.500
Beban Barang dan Jasa	D.5	65.580.000	66.480.000
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	50.800.000	53.765.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		130.531.730	131.659.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		129.027.770	150.718.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	40.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	40.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		129.027.770	150.758.500
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		129.027.770	150.758.500

Banjarnegara, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ali Imron, S.H.
196804051993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	4.403.730	6.914.500
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	129.027.770	150.758.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(128.439.500)	(153.269.270)
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		588.270	(2.510.770)
EKUITAS AKHIR	E.6	4.992.000	4.403.730

Banjarnegara, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Ali Imron, S.H.

196804051993031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

VISI

"Terwujudnya Peradilan Agama Banjarnegara Yang Agung"

MISI

1. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan visi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
2. Menjaga kemandirian badan peradilan;
3. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
5. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah- langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin
4. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal dan tata laksana kepegawaian yang tertib.
5. Terwujudnya Peningkatan kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor barang inventaris milik negara.
7. Terwujudnya Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
8. Terwujudnya tata kelola tata persuratan dan keuangan yang efektif dan efisien yang mampu terlaksananya kegiatan operasional kantor.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	124.880.000	124.880.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	124.880.000	124.880.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Banjarnegara terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan alokasi pagu anggaran belanja tahun 2024. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	40.000	(100,00)
Jumlah	-	40.000	(100,00)

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

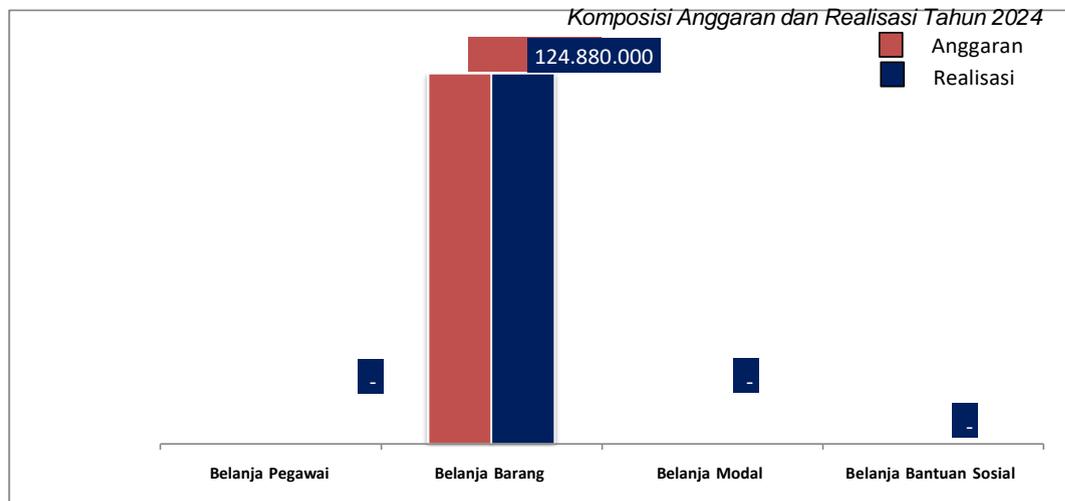
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp124.880.000 atau 100,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.124.880.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	124.880.000	124.880.000	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	124.880.000	124.880.000	100,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,11% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	124.880.000	124.745.000	0,11
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	124.880.000	124.745.000	0,11

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar 0,00 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 Tidak ada Pagu Anggaran Belanja Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Profesi Guru	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp124.880.000 dan Rp124.745.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,11% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	-	750.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	900.000	5.550.000	(83,78)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.500.000	4.500.000	88,89
Belanja Jasa	64.680.000	60.180.000	7,48
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	50.800.000	53.765.000	(5,51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	124.880.000	124.745.000	0,11
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	124.880.000	124.745.000	0,11

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Tahun 2023 Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang lebih banyak.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Selisih Harga sehingga tidak terealisasi seluruhnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluarn

Saldo Kas di BendaharaPengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pada Semester II TA 2024 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0 dikarenakan anggaran belanja pada DIPA 04 sudah selesai.

*Piutang Bukan Pajak
Rp.0*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Lancar Tagihan Penju

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidakterttagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TG R Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Semester II TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp.4.990.000

C.8 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.992.000 dan Rp4.403.730. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	4.992.000	4.403.730
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	4.992.000	4.403.730

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan Pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
	Jumlah	-	-

C.9 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

C.11 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester II TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester II TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.15 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Pada Semester II TA 2024 tidak terdapat Transaksi Tanah.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester II TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Tanah Belum
Diregister

C.17 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0.

Peralatan dan Mesin

C.18 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi tambah Peralatan Mesin.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi Kurang Peralatan Mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.19 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp0

C.20 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

*Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0*

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

C.22 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat transaksi Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: -

C.24 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak Terdapat Aset Tetap Lainnya pada periode yang berakhir 31 Desember 2024. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak terdapat transaksi Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.25 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0

C.26 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat Kontruksi Dalam Pengerjaan. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp0

C.27 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa
Rp0

C.28 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester II TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester II Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.30 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banjarnegara berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. -

C.31 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.32 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya:

-

C.33 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri:

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang belum diregister Rp.0

C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga:

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp.0

C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan:

Hibah yang belum Disahkan Rp0

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan:

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp.0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka:

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

C.44 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
tentang konsesi jasa

C.45 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.992.000 dan Rp4.403.730. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp259.559.500 dan Rp282.378.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,08. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	79.420.000	90.505.000,00	(12,25)
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	259.559.500,00	282.378.000,00	(8,08)

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.151.730 dan Rp11.414.500.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,98 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	14.151.730	11.414.500	23,98
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	14.151.730,00	11.414.500	23,98

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.580.000 dan Rp66.480.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,35 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Terjadi Kenaikan Beban Barang dan jasa karena Peningkatan kegiatan dan anggaran yang tersedia di Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	-	-	-
Beban Bahan	900.000	900.000	-
Beban Langganan Listrik	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	4.650.000	(100,00
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi	60.180.000	60.180.000	-
Jumlah	65.580.000	66.480.000,00	(1,35)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan adanya penurunan tingkat kerusakan gedung dan peralatan mesin Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.800.000 dan Rp53.765.000.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,51 persen disebabkan oleh Kenaikan biaya perjalanan dinas dikarenakan terdapat lebih banyak kegiatan ke tingkat provinsi dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.800.000	53.765.000	(5,51)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	50.800.000,00	53.765.000	(5,51)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh. Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp.0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2024	2023	0,05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2024	2023	0,05
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp.0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp.0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp.0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp40.000.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pembayaran Kewajiban	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	40.000,00	(100,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	40.000	(100,00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester II 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut:

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester II 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp4.403.730,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.403.730,00 dan Rp.6.914.500,00.

*Surplus LO
Rp.129.027.770,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.129.027.770,00 dan Rp.150.758.500,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0,00*

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah. Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-128.439.500 dan Rp.-153.269.270. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	124.880.0
Diterima dari Entitas Lain	(259.559.500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	6.240.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	(128.439.500)

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 124.880.000, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 259.559.500.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.240.000 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp4.992.000*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.992.000,00 dan Rp.4.403.730,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dalam laporan keuangan ini.

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada periode Semester II Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

1. BRI KC Jakarta Veteran A/C 653254011061000 a.n. BPG PA BANJARNEGARA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0
2. BRI A/C 651544011071000 a.n. BPG 164 PA Banjarnegara 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0.
3. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarnegara A/C 18 000 000 48 a.n. RPL 164 PA Banjarnegara Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 51.726.000.

F.2.4 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara yaitu Panjar Biaya Perkara yang dititipkan oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar Rp.88.486.500,-
2. Biaya Eksekusi sebesar Rp. 8.275.000,-
3. Biaya Konsinyasi yaitu Biaya Penitipan Pihak ke-3 sebesar Rp. 0.

F.2.5 Revisi DIPA

Pada periode Semester II tahun 2024 Informasi mengenai revisi DIPA adalah sebagai berikut :

1. Revisi 1 19 Februari 2024
2. Revisi 2 Tanggal 21 April 2024
3. Revisi 3 Tanggal 30 Mei 2024
4. Revisi 4 Tanggal 13 Juli 2024
5. Revisi 5 Tanggal 29 Oktober 2024

F.2.6 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode laporan keuangan Tahunan 2024 Unaudited.

F.2.7 Catatan Penting Lainnya (Capaian Output)

Berdasarkan Rencana Kerja (PKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat Alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional BF.1053.QBA - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, BF.1053.QCA - Perkara Hukum Perseorangan, BF.1053.QCA - Perkara Hukum Perseorangan, yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Pengadilan Agama Banjarnegara antara lain sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-13
 Kementerian Negara/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
 Eselon 1 : 005.04 - DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 Wilayah/Provinsi : 03.18 - KAB. BANJARNEGARA/JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : 401107 - PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 25-02-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	124,880,000.00	124,880,000.00	100%							
04	PERADILAN	124,880,000.00	124,880,000.00	100%							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	124,880,000.00	124,880,000.00	100%							
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	124,880,000.00	124,880,000.00	100%							
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	60,180,000.00	60,180,000.00	100%							
003	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	60,180,000.00	60,180,000.00	100%	1,500.0000	Orang	1,500.0000	100%	0%		
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	64,700,000.00	64,700,000.00	100%							
001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	32,300,000.00	32,300,000.00	100%	100.0000	Perkara	100.0000	100%	0%		
002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	32,400,000.00	32,400,000.00	100%	75.0000	Perkara	75.0000	100%	0%		

LAMPIRAN DAN DAFTAR

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:13 AM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	259,559,500	282,378,000	(22,818,500)	(8.081)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	259,559,500	282,378,000	(22,818,500)	(8.081)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	259,559,500	282,378,000	(22,818,500)	(8.081)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	14,151,730	11,414,500	2,737,230	23.98
Beban Barang dan Jasa	65,580,000	66,480,000	(900,000)	(1.354)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	50,800,000	53,765,000	(2,965,000)	(5.515)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:13 AM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	130,531,730	131,659,500	(1,127,770)	(0.857)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	129,027,770	150,718,500	(21,690,730)	(14.392)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	40,000	(40,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	40,000	(40,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	40,000	(40,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	129,027,770	150,758,500	(21,730,730)	(14.414)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	129,027,770	150,758,500	(21,730,730)	(14.414)

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

NIP 196804051993031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA 401107

Tgl Data : 25/02/25 12:13 AM
Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	124,880,000	124,880,000	0	100.00	124,745,000	124,745,000	0	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

NIP 196804051993031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:13 AM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36
JUMLAH ASET LANCAR	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36
JUMLAH ASET	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36
JUMLAH EKUITAS	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36
JUMLAH EKUITAS	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

NIP.196804051993031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:54 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	124,880,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	259,559,500	0
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	79,420,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	180,139,500
3.0	521211	Belanja Bahan	900,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	60,180,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,500,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,800,000	0
JUMLAH			384,439,500	384,439,500

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

196804051993031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:13 AM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,992,000	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	124,880,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	259,559,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,240,000
0.0	391111	Ekuitas	0	4,403,730
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	79,420,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	180,139,500
3.0	521211	Beban Bahan	900,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	60,180,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,500,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,800,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,151,730	0
JUMLAH			395,083,230	395,083,230

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

NIP.196804051993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 25/02/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 25/02/25 1:53 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,403,730	6,914,500	(2,510,770)	(36.31)
SURPLUS/DEFISIT-LO	129,027,770	150,758,500	(21,730,730)	(14.41)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(128,439,500)	(153,269,270)	24,829,770	(16.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	588,270	(2,510,770)	3,099,040	(123.43)
EKUITAS AKHIR	4,992,000	4,403,730	588,270	13.36

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

NIP 196804051993031002

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401106 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 25/02/25 2:17 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,855	10,613,780,000	496	675,701,000	496	675,701,000	3,855	10,613,780,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,855	10,613,780,000	496	675,701,000	496	675,701,000	3,855	10,613,780,000
132111	Peralatan dan Mesin		512	2,212,354,787	23	191,569,625	0	0	535	2,403,924,412
30103	ALAT BANTU	-	2	101,949,850	0	0	0	0	2	101,949,850
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	8	384,888,234	0	0	0	0	8	384,888,234
30501	ALAT KANTOR	-	53	135,637,900	0	0	0	0	53	135,637,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	307	556,362,068	17	6,984,625	0	0	324	563,346,693
30601	ALAT STUDIO	-	12	88,120,820	0	0	0	0	12	88,120,820
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	4	7,010,000	0	0	0	0	4	7,010,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	6	9,450,000	0	0	0	0	6	9,450,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	773,986,615	3	60,185,000	0	0	65	834,171,615
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	57	154,661,300	3	124,400,000	0	0	60	279,061,300
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	288,000	0	0	0	0	1	288,000
133111	Gedung dan Bangunan		6	5,268,037,000	3	968,786,000	3	968,786,000	6	5,268,037,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	4,660,287,000	0	0	1	361,036,000	3	4,299,251,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	607,750,000	2	607,750,000	2	607,750,000	2	607,750,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	0	0	1	361,036,000	0	0	1	361,036,000
135121	Aset Tetap Lainnya		91	12,180,537	0	0	0	0	91	12,180,537
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	91	12,180,537	0	0	0	0	91	12,180,537
TOTAL				18,106,352,324		1,836,056,625		1,644,487,000		18,297,921,949

Banjarnegara, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



ALI IMRON, S.H.

196804051993031002

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (005.01.0300.401107) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
 Kode dan Nama UAPPAW : (005.01.0300.097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG
 Kode dan Nama E1 : (005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
------------------	------------	------------

Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Untuk tanda bintang kurung () agar dicoret yang tidak perlu*

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA face per 31 Desember 2024	✓		Ada
3. Neraca per 31 Desember 2024	✓		Ada
4. Laporan Operasional per 31 Desember 2024	✓		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024	✓		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi Sakti Satker yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2024	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	✓		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK	✓		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	✓		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan Semester II TA 2024	✓		Ada

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	✓		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama

KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK

Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari Sakti 2024 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?	✓		Sama
Jika tidak sama, harap dikoordinasikan dengan level K/L.			
Kesesuaian Saldo 31 Desember 2024	Sama	Tidak	Seharusnya

Apakah seluruh akun Neraca Percobaan bulan Juni dari Sakti 2024 sama dengan Neraca Percobaan bulan Juni 2024 dari Aplikasi e-Rekon-LK?	√		Sama
Jika tidak sama, kemungkinan karena data yang diupload ke E-rekon bukan data yang terbaru			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) (kec.Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) (kec.Pengembalian Pendapatan)	√		Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang)	√		Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI, POLRI dan Kemenlu		√	Tidak
2. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)		√	Tidak
3. Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) Cat: seharusnya 423221		√	Tidak
4. Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)		√	Tidak
5. Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)		√	Tidak
6. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		√	Tidak
7. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		√	Tidak
8. Adakah akun 423999 (Pendapatan anggaran lain-lain)		√	Tidak
Bila ada, seharusnya diralat ke akun 423951/423952/423953 (tergantung jenis belanja TAYL yang dikembalikan)			
9. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
10. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		√	Tidak
akun 219671 hanya boleh muncul di laporan keuangan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan			
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa?		√	Ya/tidak
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun 218211			
2. (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa			Ya
3. Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?			Ya
Jika 111827 lebih kecil dari 218211, selisih tersebut agar dipastikan sama dengan nilai hibah langsung dalam bentuk barang/jasa.			
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya

1. Apakah ada transfer masuk (TM) ?	√		Ya/tidak																							
Jika ya, apakah sudah diungkapkan nama satker pengirim dan nilainya di dalam CALK? Sebutkan																										
Sudah, dari BUA Mahkamah Agung RI																										
2. Apakah mungkin ada transfer keluar (TK) ?		√	Ya/tidak																							
Jika ya, apakah sudah diungkapkan nama satker penerima dan nilainya di dalam CALK? Sebutkan																										
.....																										
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya																							
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/tidak																							
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya																							
3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN?			Ya																							
LAPORAN OPERASIONAL																										
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya																							
1. Adakah pendapatan Perpajakan		√	Tidak																							
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak																							
3. Adakah beban bunga		√	Tidak																							
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak																							
5. Adakah beban hibah		√	Tidak																							
6. Adakah beban transfer		√	Tidak																							
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak																							
Pengecekan saldo tidak ada di referensi	Ada	Tidak	Seharusnya																							
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak																							
Pengecekan saldo Normal	Ya	Tidak	Seharusnya																							
1. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	√		Ya																							
2. Apakah seluruh akun beban penyisihan piutang bernilai positif?			Ya/Tidak																							
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>																										
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya																							
Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Awal Penyisihan																										
11. Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Penghapusan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3">Contoh</th> </tr> <tr> <th>Beban Positif</th> <th>Beban Negatif</th> <th>Beban Negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo akhir penyisihan piutang</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Saldo awal penyisihan piutang (-)</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Saldo penghapusan piutang (-)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Beban penyisihan Piutang di LO =</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-20</td> </tr> </tbody> </table>				URAIAN	Contoh			Beban Positif	Beban Negatif	Beban Negatif	Saldo akhir penyisihan piutang	30	20	20	Saldo awal penyisihan piutang (-)	20	30	30	Saldo penghapusan piutang (-)	0	0	10	Beban penyisihan Piutang di LO =	10	-10	-20
URAIAN	Contoh																									
	Beban Positif	Beban Negatif	Beban Negatif																							
Saldo akhir penyisihan piutang	30	20	20																							
Saldo awal penyisihan piutang (-)	20	30	30																							
Saldo penghapusan piutang (-)	0	0	10																							
Beban penyisihan Piutang di LO =	10	-10	-20																							
Pengecekan Antar Laporan	Ya	Tidak	Seharusnya																							
12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak																							
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?			Ya																							

Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Materai), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.

13. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?			Ya

Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kodekelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset" Bila tidak ada, apakah wajar?		√	Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? <i>Bila ada, maka :</i>		√	Tidak

- 1 Pastikan didukung dengan Surat Keputusan Penilaian dari KPKNL setempat/DJKN
- 2 Pastikan berasal dari Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK

Pengecekan akun Transaksi Antar Entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Diterima dari Entitas Lain (313121) atau akun Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) dari Jurnal penyesuaian/Jurnal Umum?		√	Tidak

NERACA

Pengecekan Pos Neraca	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
3. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan			
4. Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas lainnya di KL dari hibah belum disahkan			

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada
- Beban Persediaan/ Beban yang d (di LO)	√		Ada
Bila ada persediaan tetapi tidak ada beban persediaan pastikan tidak ada pemakaian barang persediaan atau tidak ada penyerahan barang ke masyarakat			
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)		√	Ada
Bila ada persediaan tetapi tidak ada nilai Penyesuaian Nilai Aset kemungkinan tidak ada perubahan harga di dalam satu tahun anggaran atau pengadaan hanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran			
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak

- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)	√		Ada/Tidak
Bila ada pendapatan sewa tetapi tidak ada pendapatan diterima di muka pastikan tidak ada penyewaan aset yang melebihi satu tahun anggaran			
6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)		√	Ada/Tidak
Bila ada belanja sewa tetapi tidak ada belanja barang dibayar di muka pastikan tidak ada belanja sewa yang keperuntukannya melebihi satu tahun anggaran			
7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)		√	Ada
Belanja barang yang masih harus dibayar (atas belanja listrik/telepon/air) hanya muncul di laporan tahunan			
TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Bandingkan Neraca Percobaan (Sakti-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	√		Sama
2. Aset Tetap	√		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	√		Sama
4. Aset Lainnya	√		Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	√		Sama
Bandingkan Neraca Percobaan (Sakti) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (Sakti) dengan SIMAK	√		Sama
<p><i>Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi Sakti. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar- Daftar Transaksi BMN</i></p>			
	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?	√		Sama
Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi Sakti, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN			
Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		√	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		√	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		√	Tidak

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		√	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		√	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> "		√	Tidak
3 Kesamaan dengan BAR KPPN	√		Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK</i>	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)	√		Sama

<i>Kecukupan pengungkapan pada CaLK</i>	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PMK No. 177/PMK.05/2015 ?	√		Ya
3. Apakah Format LPE telah sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan Triwulan III Komprehensif atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan? (termasuk ketentuan mengenai komparasi laporan)			
4. Apakah penjelasan LPE telah sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan Triwulan III Komprehensif atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan?			
5. Apakah penjelasan Perbedaan Saldo Awal dengan e-Rekon-LK (bila ada) sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan?	√		Ya

<i>Pengungkapan Penting Lainnya</i>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya/tidak
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?		√	Ya/tidak
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?		√	Ya/tidak
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Satker?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

Perbedaan dengan e-Rekon-LK:

Contoh:

- Akun Saldo Awal Ekuitas pada LPE berbeda dengan e-Rekon-LK karena terdapat penjurnalan dengan akun 391111
- Akun Utang Pajak yang Belum Disetor berbeda dengan e-Rekon-LK karena terdapat kesalahan jurnal

Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya:

- Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU (akun 525111) + selisih Belj Peg Yg Msh Hrs Dibayar
- Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA - selisih Piutang Pengembalian Perjadin - selisih
- Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer keluar - penghapusan + Transfer Masuk + Perolehan
- dll

Mengetahui
Pejabat Penyusun Laporan Keuangan,



(SITI HALIMAH, A.Md.)

NIP. 199607312022032011

Banjarnegara, 31 Desember 2024

Penelaah,



(FATHUL YASIR FUADI, S.Kom., S.H., M.H.)

NIP. 198706222011011005



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401106
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,475,580,000	6,475,580,000	0
2	Belanja	6,393,997,138	6,393,997,138	0
3	Pengembalian Belanja	-1,091	-1,091	0
4	Estimasi Pendapatan	1,200,000	1,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,200,000	1,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25



BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nomor 1/PPK.PA.W11-A5/PL1.2.7/I/2025

Kode dan Nama UAKPB (401107) Pengadilan Agama Banjarnegara
Kode dan Nama UAPPA-W (097713) Pengadilan Tinggi Semarang
Kode dan Nama E-1 (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Kode dan Nama K/L (005) Mahkamah Agung

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pengadilan Agama Banjarnegara, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan:

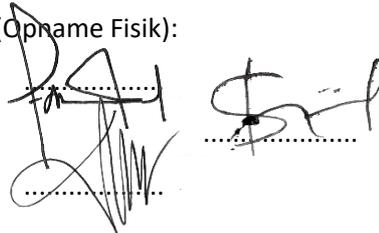
1. Nama : FATHUL YASIR FUADI
NIP : 198706222011011005
Jabatan : Ketua
2. Nama : SITI HALIMAH
NIP : 199607312022032011
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : SURACHMAN
NIP : -
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semester II Tahun 2024 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 dan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik):

1. FATHUL YASIR FUADI
2. SITI HALIMAH
3. SURACHMAN



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Banjarnegara



ALI IMRON, S.H.
NIP 196804051993031002

Penginputan 7 Januari 2025

Lampiran
Berita Acara Opname Fisik Persediaan
Nomor 1/PPK.PA.W11-A5/PL1.2.7/I/2025
Tanggal 7 Januari 2025

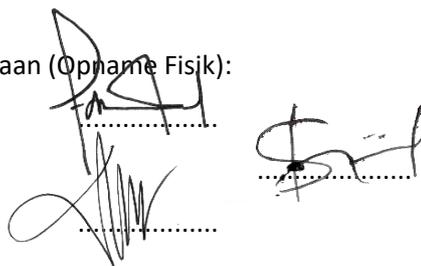
HASIL OPNAME FISIK

Kode dan Nama UAKPB (401107) Pengadilan Agama Banjarnegara
Kode dan Nama UAPPA-W (097713) Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Kode dan Nama E-1 (01) Badan Urusan Administrasi
Kode dan Nama K/L (005) Mahkamah Agung

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Formulir Akta Cerai	1010399999	24	24	-	√	-	-

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik):

- FATHUL YASIR FUADI
- SITI HALIMAH
- SURACHMAN



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Banjarnegara



ALI IMRON, S.H.
NIP 196804051993031002